

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Pendapat tersebut diperkuat oleh Utomo et al., n.d. (2015:1) bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang dominan dalam perekonomian nasional karena memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan nasional, penghasilan devisa melalui kegiatan ekspor produk pertanian. Sektor pertanian terdiri dari lima sub sektor, yaitu tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Nadziroh (2020:53) mengatakan bahwa pertanian dapat didefinisikan sebagai kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan untuk mengelola lingkungan hidup.

Kemenkeu dalam H. Amir (2014:4) menjelaskan bahwa terdapat peran penting sektor pertanian dalam perekonomian, diantaranya sebagai berikut: a) Sebagai pemacu proses industrialisasi, dalam hal ini hasil dari pertanian dapat diolah melalui proses industri misalnya tebu yang nantinya dapat dijadikan gula. b) Sebagai penyumbang devisa negara, karena sektor pertanian menghasilkan produk-produk pertanian yang *tradable* dan berorientasi pada pasar ekspor. c) Sebagai sumber pendapatan dan kesempatan kerja bagi penduduk pedesaan dimana sebagian besar penduduk pedesaan bermata pencaharian utama sebagai petani. Menurut Rodjak dalam Rondonuwu (2017:7) petani adalah orang yang melakukan kegiatan bercocok

tanam hasil bumi atau memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatannya.

Selain berperan dalam perekonomian nasional, sektor pertanian memiliki peran dalam menjaga ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan dengan baik. Menurut Swastika dalam Rusdiana & Maesya (2017:14), bahwa ketahanan pangan harus ditempatkan sebagai aktor utama pembangunan pertanian yang akan menyelamatkan dari krisis pangan di masa mendatang. Sejalan dengan konsep Malthus Deffrinica et al. (2020:49) yang menyatakan bahwa pertumbuhan pangan bagaikan deret hitung dan pertumbuhan penduduk bagai deret ukur. Apabila pertumbuhan penduduk positif tetapi tidak disertai dengan kenaikan produksi pangan maka akan berpeluang menghadapi persoalan pemenuhan kebutuhan pangan dan penduduknya dimasa mendatang. Karena pada dasarnya ketika jumlah penduduk meningkat, maka kebutuhan pangan turut serta meningkat.

Peran sektor pertanian yang telah diuraikan di atas, menunjukkan bahwa sektor pertanian sangatlah diperlukan untuk keberlangsungan kehidupan. Namun, kondisi sektor pertanian memiliki permasalahan yang perlu diperhatikan, misalnya: lahan, yang merupakan faktor utama sistem produksi pertanian cenderung menurun luas bakunya akibat pengalihan lahan ke *non* pertanian yang menyebabkan makin sempitnya lahan, sehingga berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani Rondonuwu (2017:3). Belum lagi petani masih dihadapkan permasalahan terkait

gagal panen yang biasanya disebabkan oleh hama, musim kemarau atau banjir yang melanda pertanian.

Masalah akan muncul lagi ketika petani hendak menjual hasil panennya. Petani tidak mempunyai akses langsung ke konsumen, selain itu keterbatasan kemampuan petani dalam hal negosiasi harga. Akibatnya muncul tengkulak yang berperan menyalurkan hasil panen dari petani ke pabrik pengolahan hasil pertanian. Tengkulak membeli hasil pertanian dengan harga yang ditentukan secara sepihak. Sehingga petani tidak untung malah merugi. Karena hasil panen yang merugi menyebabkan petani kebingungan terkait modal yang diperlukan untuk bercocok tanam kembali. Berangkat dari kondisi tersebut, masyarakat memandang bahwa usaha sektor pertanian memiliki banyak resiko kegagalan. Pandangan tersebut menyebabkan menurunnya minat masyarakat untuk bekerja sebagai petani, bahkan jarang ditemui cita-cita sebagai seorang petani. Sejalan dengan pendapat tersebut, dalam artikel *Liputan6.com*, Dedi Nursyamsi mengatakan:

“Saat ini keadaan pertanian Indonesia mengalami penurunan dalam segi pelaku petaninya. Jika terus begitu, maka 10 tahun yang akan datang Indonesia akan mengalami krisis petani, karena petani-petani di Indonesia umurnya sudah mendekati umur kurang produktif. Jumlah pertanian milenial yang umurnya 19-39 tahun mengalami penurunan setiap tahunnya. Bahkan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah petani milenial yang umurnya 19-39 tahun itu menurun terus, untuk contohnya seperti tahun 2017 ke tahun 2018 ada penurunan kurang lebih 415 ribu petani milenial. Sementara itu, saat ini petani-petani di Indonesia umurnya sudah mendekati kurang produktif dan banyak yang mendekati usia 56-60 tahun, yang fase ini merupakan fase kurang produktif, sementara penambahan petani muda masih tersendak”. Kata Dedi Nursyamsi, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP).
(Sumber: <https://www.liputan6.com>. diakses pada 28 Februari 2021 pukul 06:21 WIB).

Dari paparan tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat kesenjangan antara kehidupan petani yang seharusnya makmur dengan peran yang dimiliki, namun pada realitanya nasib petani sangatlah memprihatinkan. Menyikapi hal tersebut, perlu adanya peran pemerintah dalam mengurangi kerugian atau menanggulangi risiko gagal panen yang dapat dilakukan melalui pemberdayaan petani. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan agar objek mempunyai daya atau mempunyai kekuatan dalam Hamid (2018:9). Pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga masyarakat memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan. Dengan adanya pemberdayaan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Menurut D. Husna (2016:216) kesejahteraan ditandai dengan adanya kemakmuran yaitu meningkatnya konsumsi yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pemberdayaan petani memiliki program insentif berupa program petani mandiri. Program petani mandiri atau yang biasa disingkat PPM, merupakan salah satu program utama Bupati Bojonegoro. Program petani mandiri adalah hibah berupa modal yang berwujud barang kepada petani untuk memberikan kesejahteraan dan kemandirian bagi petani. Untuk menjalankan program tersebut pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengeluarkan kartu petani mandiri plus atau yang biasa disebut KPM plus. Kartu Petani Mandiri (KPM) plus adalah kartu yang diberikan kepada keluarga petani yang sesuai dengan

kriteria sebagaimana peraturan perundang-undangan sebagai penanda/identitas sekaligus akses untuk mendapatkan manfaat KPM plus.

Program ini ditujukan kepada petani yang ada di Bojonegoro baik pemilik lahan/sawah maupun penggarap sawah, baik petani padi, petani sayur, petani sawah maupun petani ladang. Dengan adanya program ini diharapkan petani Bojonegoro mampu lebih produktif dan mandiri. Sehingga hasil pertanian mampu dijadikan andalan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Terlebih Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu Kabupaten yang menjadi lumbung pangan nasional, di mana Kabupaten ini ada pada barisan atas di Provinsi Jawa Timur sebagai penghasil panen yang berkualitas. Serta pekerjaan sebagai petani masih diminati oleh masyarakat Bojonegoro, dapat dilihat pada tabel persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan kerja di Kabupaten Bojonegoro, sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan di Kabupaten Bojonegoro, 2018

No.	Lapangan Pekerjaan	Persentase (%)
1.	Pertanian	39,52 %
2.	Jasa	38,31 %
3.	Industri	22,17%

Sumber : Sakemas, Agustus 2018

Tabel 1.1 Menggambarkan bahwa lapangan pekerjaan di Kabupaten Bojonegoro pada sektor pertanian mencapai 39,52%. Bisa dikatakan bahwa sektor jasa dan sektor industri sebanding/seimbang dengan sektor pertanian. Salah satu faktor tenaga kerja sektor pertanian masih diminati ialah sektor tersebut tidak

memerlukan kualifikasi pendidikan tertentu, dengan kegiatan pertanian yang bersifat konvensional.

Program petani mandiri diatur dalam Peraturan Bupati nomor 43 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 20 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2018 tentang program petani mandiri. Agar petani di Bojonegoro tergabung dalam program petani mandiri, maka harus memenuhi persyaratan yang ada, diantaranya: a) Tergabung dalam kelompok tani. b) Memiliki lahan kurang dari 2 Ha. c) Fotokopi Kartu Keluarga. d) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan Kependudukan dan Catatan Sipil. e) Fotokopi Sertifikat Kepemilikan tanah atau Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah setempat disertai bukti foto kopi SPPT PBB. Sesuai data yang diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2019 petani yang tergabung dalam program kartu petani mandiri sebesar 19.966 petani. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah petani yang tergabung dalam program kartu petani mandiri sebesar 55.966 petani. Petani yang tergabung dalam KPM terbentuk dari kelompok-kelompok sesuai wilayah masing-masing.

Manfaat yang dapat dirasakan petani yang tergabung dalam program tersebut, diantaranya: manfaat yang pertama bantuan modal berupa bantuan barang dalam bentuk pupuk dan benih padi maupun prasarana penunjang pertanian yang dinaungi oleh Dinas Pertanian. Manfaat yang kedua yakni, memberikan akses pelatihan dan pengembangan usaha tani, yang dilakukan oleh DISNAKER. Manfaat yang ke tiga, berupa jaminan pembelian hasil pertanian, PEMKAB akan bekerja sama dengan

dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) untuk membeli hasil pertanian dari petani lokal Bojonegoro melalui Bumdes yang ada. Manfaat yang ke empat ialah asuransi gagal panen dan peternakan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian. Manfaat ke lima ialah beasiswa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, program petani mandiri membuka peluang beasiswa bagi anak petani yang tergabung dalam kelompok tani dengan spekulasi untuk mahasiswa yang memiliki syarat dan ketentuan tertentu.

Agar manfaat program tersebut dapat dirasakan langsung oleh petani perlu adanya peran pemerintah Kabupaten Bojonegoro khususnya kerjasama antar dinas yang terlibat dalam program tersebut. Koordinasi di antara pelaku program petani mandiri merupakan kerangka mendasar yang harus diwujudkan guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Pelaku program KPM dalam konteks ini adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, DISNAKER Kabupaten Bojonegoro, Dinas PMD Kabupaten Bojonegoro, Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dan petani yang telah tergabung dalam program tersebut. Agara tercipta efisiensi, efektivitas dan produktivitas dari program petani mandiri, perlu koordinasi antar instansi terkait, dan *team work* yang kuat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Sehingga penelitian ini menjadi penting untuk melihat pemberdayaan petani yang dilakukan pemerintah Kabupaten bojonegoro dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui pogram tersebut.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap dengan adanya program petani mandiri dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Sejalan dengan uraian tersebut,

terdapat artikel yang termuat dalam *Trans Bojonegoro*, Kasmidjan mengatakan bahwa:

“Program KPM ini merupakan program yang pro petani. Karena jika biasanya petani saat masuk musim tanam akan mencari pinjaman uang, adanya KPM saat ini petani sudah mempunyai bibit dan persediaan pupuk. Sehingga saat panen nanti, petani akan memperoleh hasil yang besar. Karena biasayakan hasil panen itu dipotong untuk modal pinjaman”. Kata Kasmidjan ketua poktan “tani harapan makmur 01” (Sumber: <https://www.transbojonegoro.com>, diakses pada 23 Maret 2021 pukul 19:32 WIB).

Bahkan jumlah petani yang tergabung dalam program petani mandiri di Kecamatan Baureno terus mengalami peningkatan. Meningkatnya jumlah petani yang tergabung dalam program kartu petani mandiri menunjukkan bahwa petani di Kecamatan Baureno sadar akan pentingnya program tersebut. Sejalan dengan pernyataan tersebut, dalam artikel *Media Center Bojonegoro*, Helmy Elisabeth mengatakan bahwa:

“Di Kecamatan Baureno, jumlah kelompok tani (poktan) bertambah. Tahun 2019 ada 2 poktan yang menerima KPM. Tapi, tahun 2020 ini, ada 19 poktan di Baureno yang menerima KPM. Untuk KPM di Baureno, totalnya Rp 2,7 miliar.” kata Helmy Elisabeth Kepala Dinas Pertanian. (Sumber: <https://www.kanalbojonegoro.com>, diakses pada 9 Februari 2021 pukul 16:49 WIB).

Namun disisi lain, Kecamatan Baureno merupakan Kecamatan rawan bencana banjir, karena berada dikawasan aliran sungai Bengawan Solo, tidak jarang petani mengalami gagal panen/puso. Bahkan baru-baru ini petani juga mengalami gagal panen/puso yang disebabkan bencana banjir. Hal ini juga termuat dalam *Berita Bojonegoro*, Zaenal Fanani mengatakan bahwa:

“Ada sebanyak 2.733 hektare tanaman padi milik petani di 11 kecamatan Kabupaten Bojonegoro yang terendam banjir. Tanaman padi yang tergenang tersebut berada di Kecamatan Kapas, Sukosewu, Baureno, Kanor, Malo, Bojonegoro, Sumberejo, Kepohbaru, Balen, Gayam, dan Kecamatan Trucuk. Sebanyak 546 hektare di antaranya terancam puso atau gagal panen, yang berada di wilayah Kecamatan Baureno seluas 498 hektare dan Kecamatan Kapas seluas 48 hektare.” Kata Zaenal Fanani Kepala Bidang (Kabid) Sarana, Prasarana, dan Perlindungan Tanaman, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bojonegoro.

(Sumber: <https://kumparan.com>, diakses pada 20 Februari 2021 pukul 11:43 WIB).

Berangkat dari fenomena yang telah diuraikan diatas. Terdapat kesenjangan dimana manfaat yang diberikan oleh program petani mandiri mulai dirasakan oleh petani, namun disisi lain petani masih mengalami gagal panen/puso. Penelitian ini diarahkan untuk meneliti sejauh mana pemberdayaan petani melalui program petani mandiri yang dilihat dari upaya untuk membangun daya dengan mendorong (*encourage*), memotivasi, dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk penyediaan berbagai masukan (*input*), pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya. Sehingga pemberdayaan masyarakat tidak membuat masyarakat bergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Penelitian ini difokuskan kepada petani padi/perkebunan baik pemilik lahan, maupun penggarap di Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro yang penulis tuangkan dalam judul, **“Pemberdayaan Petani melalui Program Petani Mandiri di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, bagaimana pemberdayaan petani melalui program petani mandiri di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan petani melalui program petani mandiri di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini berguna untuk menunjang pendidikan dan bahan perbandingan bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang, serta sebagai acuan akademik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya untuk mahasiswa maupun akademisi Universitas Pembangunan Nasional Pembangunan “Veteran” Jawa Timur.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada Pimpinan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro khususnya yang terlibat dalam program petani mandiri untuk menjalankan peran dan programnya guna mensejahterakan petani Bojonegoro.

3. Bagi Mahasiswa

- a) Dapat memperdalam pengetahuan tentang pemberdayaan petani melalui program petani mandiri di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.
- b) Dapat menerapkan teori atau pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan program studi Ilmu Administrasi Publik.